BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Tinjauan Umum Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA).

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengelolaan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor: 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengelolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I

Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaa PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin computer IBM S-370/125 seperti: IPTN, PJKA, ITB, dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Guberur NO. 21 tahun 1992 tentang pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerttah Tingkat I Jawa Barat Nomor:

22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengelolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor: B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengelolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platfom dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

2.1.2 Visi dan Misi DISKOMINFO Jabar

Visi Diskominfo Provinsi Jawa Barat yaitu: Diskominfo Andal dan Berperan dalam Sistem Informasi dan Telematika Guna Mendukung Terwujudnya Visi Jawa Barat.

Misi Diskominfo Provinsi Jawa Barat yaitu:

- Meningkatkan profesionalisme organisasi Diskominfo
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi
- Mewujudkan aparatur dan masyarakat berbudaya informasi
- Mengembangkan infrastruktur sistem informasi dan telematika
- Mengembangkan sistem informasi dan telematika yang terpadu dan kesinambungan sehingga menjadi sistem informasi manajemen daerah Jawa Barat sebagai sumber informasi utama bagi perumusan kebijakan Pemerintah Provins**i**

2.1.3 Tujuan DISKOMINFO Jabar

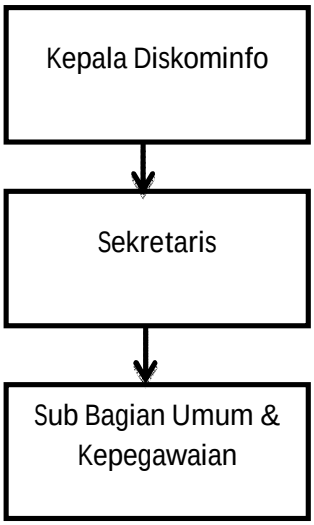
Tujuan dari Diskominfo adalah:

- Tersusunya kebijakan Pemerintah Provinsi yang mendukung pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi dan telematika
- terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas
- terwujudnya pengelolaan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.
- Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Diskominfo
- Terwujudnya SDM yang memiliki keahlian di bidang TI
- Terwujudnya peta kebutuhan SDM bidang TI
- Terwujudnya kekuatan SDM yang ideal dalam bidang TI
- Terwujudnya kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang TI sebagai acuan/rujukan bagi aparatur dan masyarakat
- Terwujudnya dukungan Pemerintah Provinsi terhadap pendayagunaan sistem informasi dan telematika
- Terwujudnya aparatur yang mampu mendayagunakan sistem informasi dan telematika secara optimal dalam pelaksanaan tugas

- Terwujudnya manfaat pendayagunaan sistem informasi dan telematika dalam peningkatan kinerja organisasi
- Terwujudnya komitmen unit kerja terkait untuk mendayagunakan sistem informasi dan telematika dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu system pembagian kerja yang didalamnya terdapat hubungan kelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi perusahaan sangat penting peranannya didalam menjalankan dan mengendalikan aktifitas perusahaan sehingga seluruh kegiatan perusahaan yang baik dan efektif dapat tercapai. Organisasi merupakan wadah kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung.



Gambar. 2.1 Gambaran Umum Struktur Organisasi Kepala Diskominfo, Sekretaris dan Sub Bag Umum & Kepegawaian

2.3. Deskripsi Pekerjaan

Adapun fungsi-fungsi jabatan dari struktur organisasi Diskominfo adalah sebagai berikut

1. Kepala Diskominfo

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas pokok badan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok segabaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Badan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang sistem informasi dantelematika
- Menyususn perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengendalian bidang sistem informasi dan telematika
- Fasilitasi penyelenggaraan bidang sistem informasi dant telematika
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinan UPTD.

Adapun rincian tugas kepala Badan adalah

- Memimpin perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan telematika
- Mengatur penyusunan perencanaan, pengembangan, dan penglolaan bidang sistem informatisi dan telematika

- Membina pendayagunaan dan pengendalian bidang sistem informasi dan telematika
- Memotivasi dan mengendalikan tugas badan

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi rumah tangga dan perlengkapan
- Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja badan
- Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana kerja badan

Adapun rincian tugas Sekretariat adalah:

- Menyelenggarakan pengkajian program dinas dan sekretaris
- Menyelnggarakan pengelolaan adiministrasi kepegawaian
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan

- Mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas badan
- Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitasi kinerja (LAKIP).
- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketetelaksanaan
- Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.
- Menyelenggarakan penyusunan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan
- Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja ruting dan anggaran pembangunan
- Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan
- Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional tertentu
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

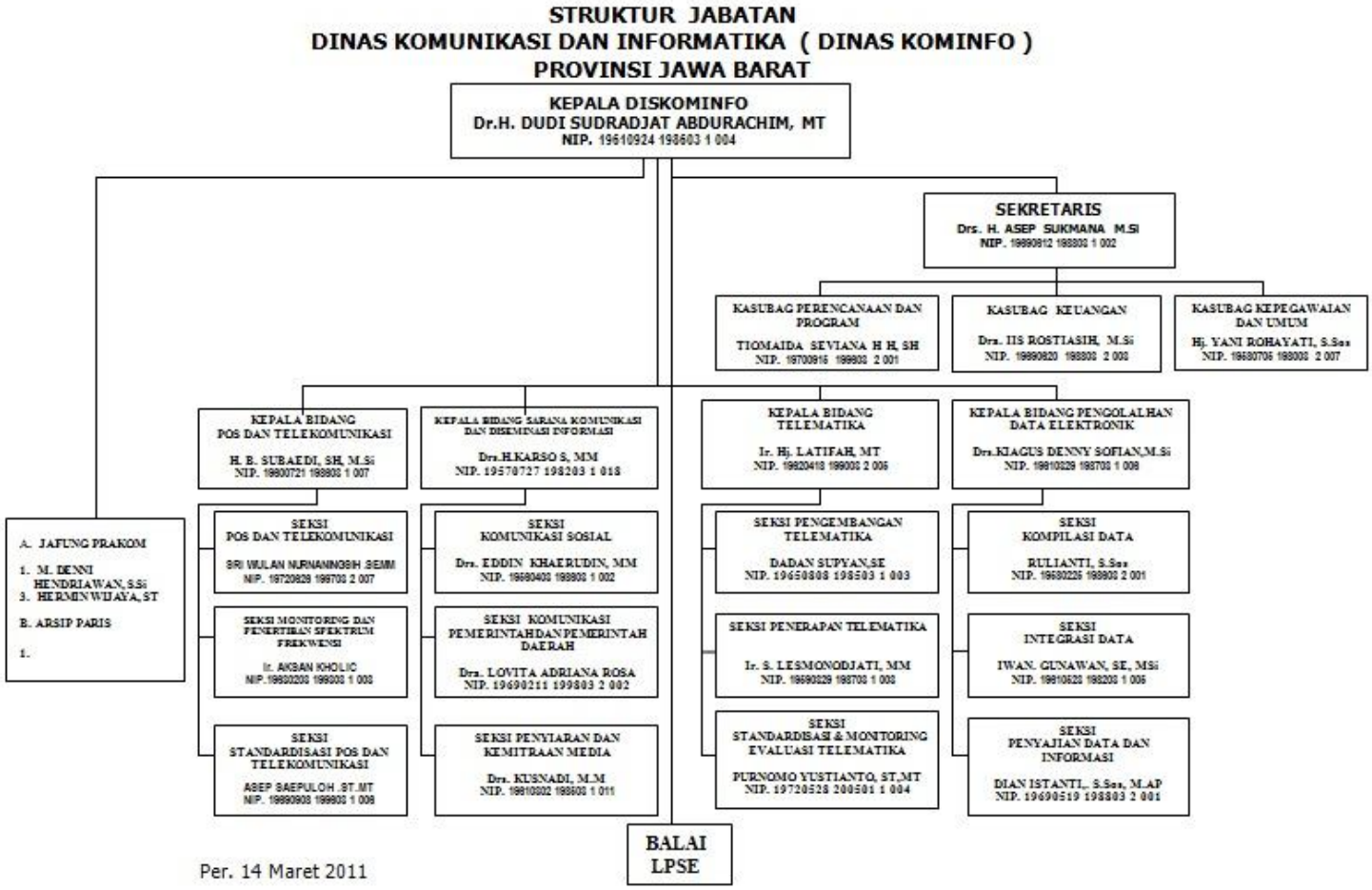
Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Sekretariat

- Mengelola administrasi Sub Bagian Umum
- Menyusun evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum

Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum adalah:

- Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit
- Melaksanakan pengelolaan keprotokolan meliputi rapat dinas, upacara, pengaturan kunjungan tamu dinas dan rumah tangga badan
- Melaksanakan pengelolaan barang kantor dan jasa
- Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor dan barang inventaris kantor

- Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas bendaharawan barang
- Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas bendaharawan barang
- Melaksanakan pengelolaan perpustakanaan dan hubungan masyarakat
- Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan stategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait



Gambar 2.2. Struktur Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.2. Struktur Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Kominfo Jawa Barat